

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016



BPPT Kota Bandung



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bandung
Jl. Cijanjur No.34 Bandung



Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunianya Reviu Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPT Kota Bandung Tahun 2016, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan BPPT Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

Bandung, Juli 2015
**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU,**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19661207 198603 1 006**



1.1. Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi BPPT Kota Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Pembinaan dan Apel Pagi Karyawan dan Karyawati BPPT Kota Bandung

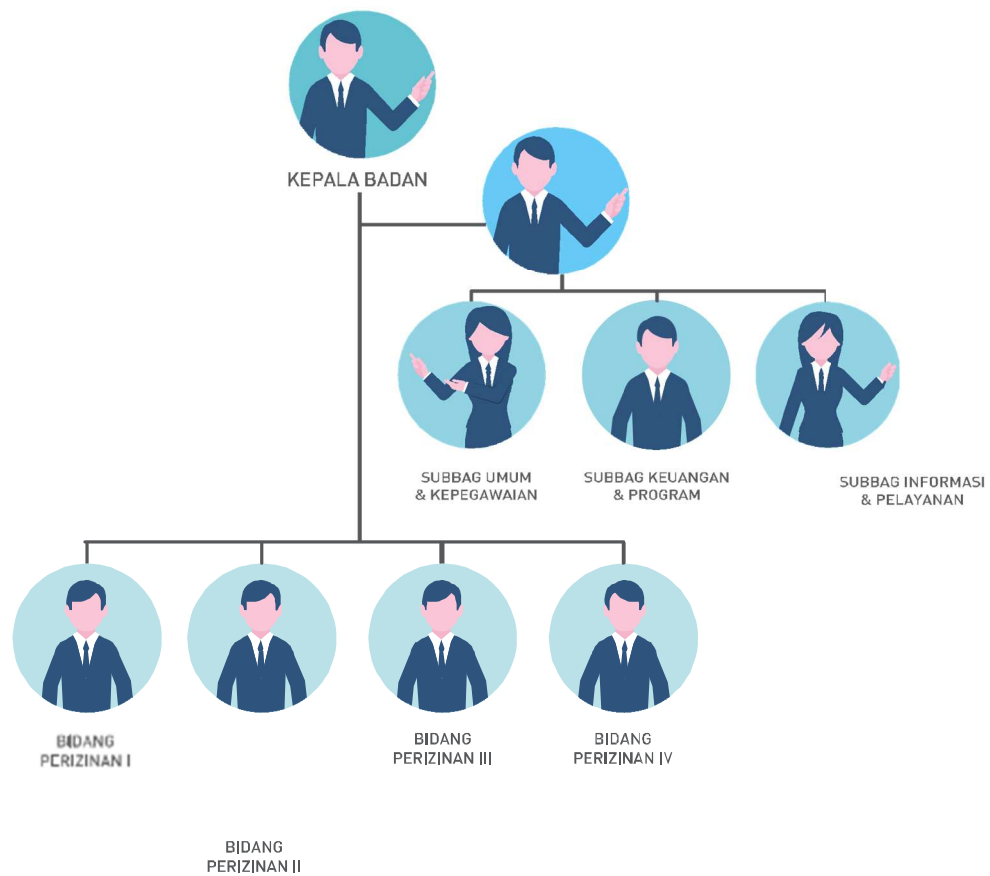
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;

3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

- c. Bidang Perizinan I.
- d. Bidang Perizinan II.
- e. Bidang Perizinan III.
- f. Bidang Perizinan IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Tim Teknis.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA BANDUNG**





BAB II

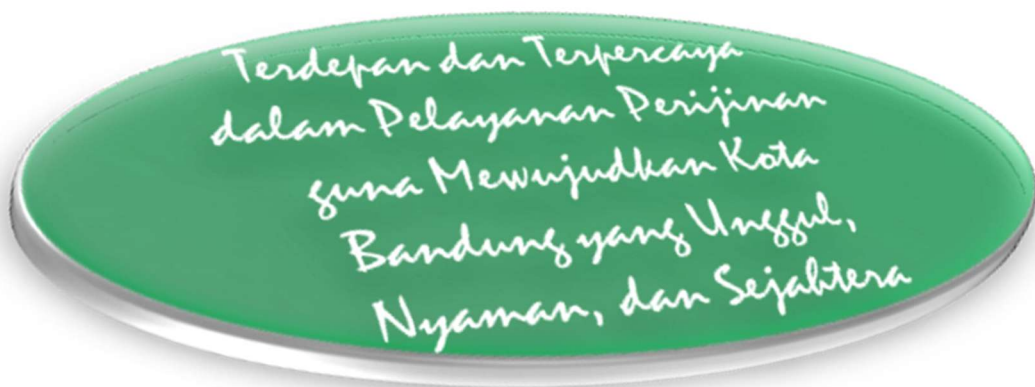
RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini BPPT Kota Bandung. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013–2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana BPPT Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013 -2018 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.635-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

2.1. Visi dan Misi

A. VISI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dituntut untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Kota Bandung. Untuk itu, disusun **Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung** sebagai berikut :



Adapun pemahaman visi BPPT Kota Bandung 2013-2018 sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan **Terpadu**; menggambarkan arahan model pelayanan perizinan yang dituju. Model pelayanan yang terpadu ini memudahkan masyarakat karena masyarakat cukup datang ke BPPT saja untuk mengurus perizinan. Artinya pengurusan perizinan hanya dilakukan oleh satu SKPD sebagai pemberi layanan izin.
2. **Terdepan**; kejaran BPPT Kota Bandung untuk menjadi badan pelayanan perizinan yang paling unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dengan melakukan inovasi,

transparan dan akuntabel serta berorientasi *public satisfaction* agar lebih efektif dan efisien, serta mengakomodir pelanggannya dengan baik.

3. **Terpercaya**; merepresentasikan kepercayaan masyarakat selaku pelanggan dari pelayanan perizinan. Kepercayaan ini dapat diraih melalui pelayanan yang berpusat kepada pelanggan (*customer-centric*) dalam tujuannya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera, visi BPPT Kota Bandung diarahkan untuk mendukung Visi Kota Bandung melalui penyediaan jasa pelayanan yang dapat memberikan kepuasan parapelanggannya.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merumuskan pernyataan **Misi** sebagai berikut :

"Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Secara Berkelanjutan"

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran strategis adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran strategis harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor–faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan/RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung beserta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN
BPPT KOTA BANDUNG
HASIL REVIU TAHUN 2015

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	TARGET KEBERHASILAN TUJUAN
Meningkanya kualitas dan kinerja BPPT dalam Pelayanan Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase izin sesuai waktu 3. Rata-rata kecepatan penyelesaian pelayanan izin 4. Nilai Evaluasi AKIP	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 2. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1. Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra BPPT (86) 2. Seluruh berkas izin terbit sesuai waktu (100%) 3. Kecepatan pelayanan pada akhir periode Renstra 4,5 hari kerja 4. Terwujudnya nilai SAKIP A

Tabel 2.2
Matrik Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Setelah Reviu KemenPAN dan RB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	83	84	85	86
		Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penurunan Pengaduan	-	20%	40%	60%	80%
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	850	860	870	880	890
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	8 hari kerja	6 hari kerja	5 hari kerja	4,5 hari kerja	4 hari kerja
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai evaluasi AKIP	65	70	75	77	80
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan BPPT Kota Bandung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait. Hasil keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BPPT Kota Bandung

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan Perijinan guna Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perijinan	4. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 5. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur, melalui:
 - a. perumusan standar kompetensi;
 - b. *assessment* ulang pegawai;
 - c. pengukuran kinerja pegawai;
 - d. peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, melalui:
 - a. *online services system*;
 - b. *full paperless service*; dan
 - c. integrasi sistem.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui:
 - a. re-orientasi mekanisme kerja; dan
 - b. *one day service*.
4. Mengintensifkan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya melalui:
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. pengelolaan arsip secara digital.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengendalian internal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
5. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
6. Meningkatkan interkoneksi antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
7. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat;

8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

2.4 Komponen Rencana Strategis

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja BPPT Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis BPPT Kota Bandung, Tahun 2014-2018 yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bagian dan bidang di Lingkungan BPPT Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen- komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis BPPT Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).



BAB III

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2015

3.1 Capaian kinerja tahun 2014.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2014 BPPT Kota Bandung menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan melalui 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil rewiu yang ingin dicapai.. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (71,43%) telah mencapai atau melampaui target, dan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (28,57%) tidak mencapai target.

Tabel 3.1
Tingkat Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian Sasaran					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	3	2	50	0	0	2	50
2	Sasaran 2	1	0	0	0	0	1	100
3	Sasaran 3	3	1	33.33	2	66.67	0	0
	Jumlah	8	3	37.5	2	25	3	37.5

Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 66.67% atau tidak mencapai target

2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.125% atau tidak mencapai target

3. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 104,73% atau melampaui target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, 1 sasaran telah melampaui target dan 2 sasaran belum mencapai target.

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BPPT, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja BPPT Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
BPPT Kota Bandung Tahun 2014-2018

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2018	
					Target	Realisasi	%	Target	%
Misi Ke-1									
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	83.28	111.04	86	96.84
		2	Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100	66.48	66.48	100	66.48
		3	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	930	109.41	950	97.89
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	4	Rata-rata waktu penyelesaian izin	Hari kerja	8 hari kerja	8.39 hari kerja	95.125	4 hari kerja	9.75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	5	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	65	74.22	114.18	80	92.78
		6	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		7	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja BPPT pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

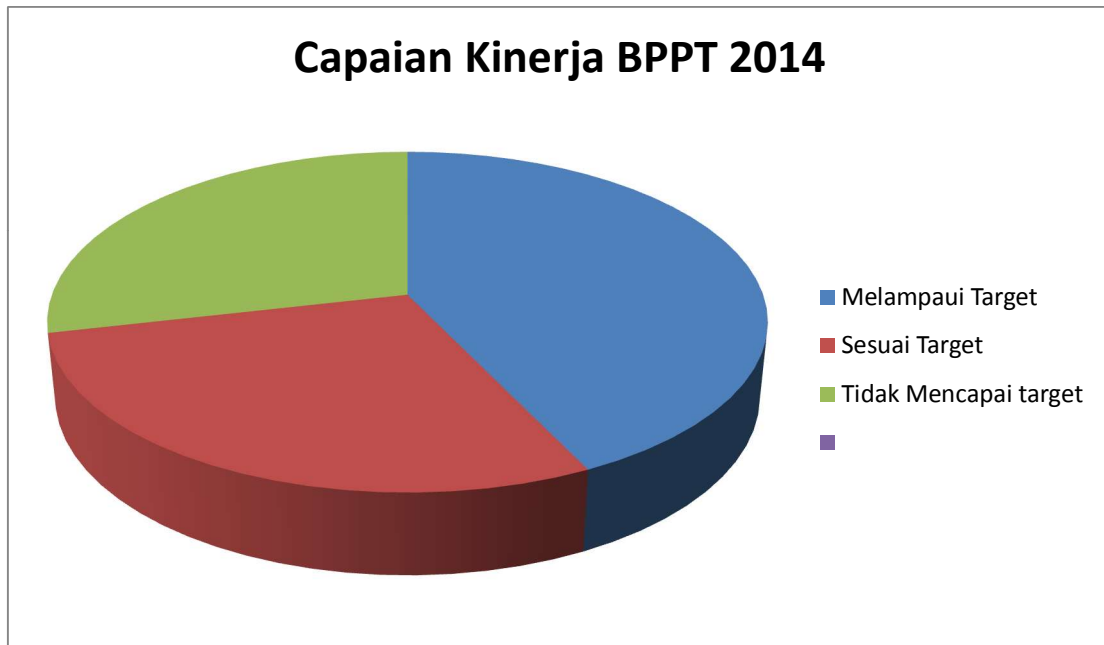
NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	3	42.86%
2	Sesuai Target	2	28.57%
3	Tidak Mencapai Target	2	28.57%

Sedangkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis BPPT Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	Nilai	75	83,28	111%
		Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100%	66.48%	66.48%
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	930	109,41%
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	Hari kerja	8 hari kerja	8,39 hari kerja	95,125%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	65	74,22	114,18%
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
		Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) indikator berikut pencapaiannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 3 (tiga) indikator melebihi target yang direncanakan dengan kategori sangat baik
- Sebanyak 2 (dua) indikator sesuai target dengan kategori sangat baik, dan
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak mencapai target



1.1 Capaian kinerja SKPD Triwulan 1 tahun 2015.

Capaian kinerja BPPT pada triwulan 1 tahun 2015 secara umum telah mencapai target yang diharapkan, perkembangan capaian kinerja sampai dengan triwulan ke-satu tahun 2015, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Strategis Triwulan 1 Tahun 2015
BPPT Kota Bandung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	Triwulan 1	83	76.67	95.84	
		2	Penurunan Jumlah Pengaduan	%	20	-	-	-	-	Diukur pada akhir tahun sesuai SK IKU BPPT
		3	Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100	Triwulan 1	100	82.29	82.29	
		4	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	935	-	-	-	n/a	Diukur pada akhir tahun sesuai SK IKU BPPT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	1 Rata-rata waktu penyelesaian izin	Hari kerja	6 hari kerja	Triwulan I	6 hari kerja	5.43	109.50	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1 Nilai evaluasi AKIP	Nilai	76	-	-	-	-	
		2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	-	-	
		3 Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	100	-	-	-	-	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada triwulan ke-1 Tahun 2015 hanya terdapat 3 (tiga) indikator BPPT yang telah muncul data pengukuran dan capaian kinerja (1 indikator melampaui target), sehingga dapat diketahui pula sebanyak 5 (lima) indikator masih dalam tahap perkembangan pencapaian target kinerja.

1.2 Rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2014 dan triwulan 1 tahun 2015

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPT Tahun 2014 dan belum terdapat rekomendasi yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan ke-satu Tahun 2015. Rekomendasi yang tercantum dalam LKIP Tahun 2014 berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5
Rekomendasi Peningkatan Kinerja BPPT

No	Sasaran	Rekomendasi / Rencana Aksi
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan sarana dan prasarana BPPT pasca terjadinya kebakaran 2. Melakukan self assessment penilaian Ombudsman RI 3. Mensosialisasikan cara pengurusan izin ke seluruh wilayah kecamatan seKota Bandung

No	Sasaran	Rekomendasi / Rencana Aksi
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	1. Penyusunan dan persiapan penerapan mekanisme OSS (online services system)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti seluruh temuan yang ada baik dari BPK maupun inspektorat 2. Membenahi aset BPPT

Rekomendasi tersebut di atas sedapat mungkin dapat direalisasikan pada Tahun 2015 dan tahun 2016 dengan maksud untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2013-2018.



BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran BPPT Kota Bandung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis BPPT Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah reviu oleh KemenPAN dan RB, BPPT Kota Bandung ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPPT Kota Bandung.

1.1. Indikator Kinerja BPPT Tahun 2016

a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama BPPT Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2016
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	Nilai	84
		Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100%
		Persentase Penurunan Pengaduan	%	40%
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	940
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktupenyelesaianizin	Hari kerja	5,5 hari kerja

b. Analisis Perbandingan Target Kinerja Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Target Tahun 2015	Rencana Target Tahun 2016	Target Tahun 2016 Hasil Reviu
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	83.28	83	81	84
		2. Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100	66.48	100	100%	100%
		3. Persentase Penurunan Pengaduan	%	n/a	n/a	20	40%	40%
		4. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	930	935	870	940
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	1. Rata-rata waktupenyelesaianizin	Hari kerja	8 hari kerja	8.39 hari kerja	6 hari kerja	5,5 hari kerja	5,5 hari kerja

Dari analisis perbandingan data target dan realisasi tersebut di atas, maka terdapat beberapa indikator yang memerlukan reviu target pada tahun 2015 dan tahun 2016 antara lain pada indikator sebagai berikut :

1. Nilai IKM, realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar 83.28 dan telah melebihi target tahun 2015 dilakukan revisi target pada tahun 2015 menjadi 83 (sebelumnya 80) dan target tahun 2016 dilakukan revisi menjadi 84;
2. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI, realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar 930 telah melebihi target tahun 2015 dilakukan revisi target pada tahun 2015 menjadi 935 (sebelumnya 860) dan target tahun 2016 dilakukan revisi menjadi 940.

a. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 memuat sasaran, indikator kinerja dan target berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2014 dan target hasil reviu pada sub bab sebelumnya, dan tersusun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Kinerja Tahunan BPPT Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2016
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)	Nilai	84
		Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100%
		Persentase Penurunan Pengaduan	%	40%
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	940
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	Hari kerja	5,5 hari kerja
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	77
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100
		Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	%	100

1.2. Rencana Kerja dan Anggaran BPPT Tahun 2016

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2016 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis BPPT tahun 2014-2018, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di lingkungan BPPT tahun 2016 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2016	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.150.000.000
		Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	%	100%		
		Persentase Penurunan Pengaduan	%	40%		
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	940		
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	Hari kerja	5,5 hari kerja	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.150.000.000
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	77	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	235.000.000
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	%	100		



BAB V

PENUTUP

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2016 ini merupakan komitmen BPPT Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan BPPT Kota Bandung tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan BPPT Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan BPPT Kota Bandung Tahun 2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, Juli 2015
KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Drs. H. EMA SUMARNA, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661207 198603 1 006